

**FINANCIAL DISTRESS VS FINANCIAL HEALTH VS FINANCIAL SUSTAINABILITY:
MANAKAH YANG MENCERMINKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DI INDONESIA SAATINI?****Annisa Fitriana Kusumawati¹⁾**¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah SurakartaE-mail: afk162@ums.ac.id**Abstract**

The urgency of this research came when the Covid-19 pandemic broke out in Indonesia. The Covid pandemic not only attacked human health, but also significantly impacted the economy. In the year Covid-19 emerged, economic growth in Indonesia fell by -2.07% in 2020. The decline in economic growth was due to the gap between public debt and state revenues, resulting in a fiscal deficit. Various policies have been implemented to increase economic growth and close the fiscal gap, such as the national economic recovery program, circular economic empowerment, and green economy penetration. Which programs are considered to be able to increase economic growth in the financial health corridor or furthermore the program is a renewable step to achieve financial sustainability. This study tries to answer the current conditions in Indonesia, namely is Indonesia still in distress? Or has Indonesia slowly recovered? Or has Indonesia moved towards economic sustainability? To answer these research questions, researchers used the Central Java Regency/City Government Financial Report for 2020-2022 as a tool and population in this study. The research sample was selected using purposive sampling. The data source was obtained through the bpk.go.id website. For data analysis, researchers used SPSS 26 software. The results of the research conducted by the study indicate that Indonesia's current economic growth is reflected in financial health conditions. In addition, through various national economic recovery programs, Indonesia has been able to overcome financial distress conditions. However, economic growth in Indonesia unfortunately has not projected a state of financial sustainability.

Keywords : financial distress; financial health; financial sustainability; economic growth; government**1. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara berkembang yang selalu senantiasa melakukan pembangunan disegala bidang. Negara berkembang merupakan negara yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, masalah perekonomian yang banyak (Raza *et al.*, 2024), juga rendahnya pembangunan infrastruktur guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Alhasil, dalam mewujudkan negara yang berlandaskan pada kesejahteraan masyarakat, negara harus dapat meningkatkan pembangunan dengan cara berinovasi disegala bidang (ALshubiri, 2024). Untuk mencapai suatu negara yang berkeadaan yang baik, maka hal ini memerlukan kontribusi yang besar dari segala bidang (ALshubiri dan Al Ani, 2024); (Yap, 2024); (Li and Zhu, 2023).

Namun, hasil kontribusi yang diharapkan oleh masyarakat terhambat yang diakibatkan karena adanya pandemi terjadi di Indonesia. Pandemi ini tak

hanya berdampak pada sisi kesehatan, juga berdampak pada krisis ekonomi (Agyemang *et al.*, 2023); (Diab, 2024); (Aduhene and Osei-Assibey, 2021). Di Indonesia, krisis ekonomi ini ditunjukkan dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07% (www.kemenkeu.go.id). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi suatu negara secara terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu (Li *et al.*, 2023). Hal ini juga dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian, yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional. Di era globalisasi ini, pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan menjadi salah satu tolok ukur pencapaian kemajuan perekonomian suatu negara (Adetokunbo and Yusuf, 2024). Kesejahteraan suatu negara dapat diukur dari

sejauh mana negara tersebut mampu menciptakan perekonomian yang terus berkembang dengan baik (Tunio *et al.*, 2024); (Ramirez, 2024); (Onyango, 2024). Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, dengan berbagai target yang diharapkan oleh masyarakat serta beberapa target yang secara khusus diharapkan oleh pemerintah pemerintah, diharapkan kedua belah pihak dapat bersinergi untuk mewujudkan perekonomian yang lebih matang.

Seperti yang telah dibahas pada alenia sebelumnya, tujuan bersama untuk mewujudkan kematangan kondisi perekonomian saat ini harus tertunda dan belum dapat terealisasi dengan baik. Krisis ekonomi akibat pandemi ini menimbulkan distress pada sektor keuangan, yang mana kondisi ini mendapat gangguan yang menghambat fungsi intermediasi sektor keuangan (Kalra, 2010). Kondisi distress ini seringkali disebut dengan *financial distress*. *Financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah pada setiap kegiatan berdasarkan kebijakannya, baik dalam kegiatan operasi, utang, pembangunan, serta infrastruktur lainnya dalam memenuhi tujuan pelayanan kepada masyarakat, sesuai standar mutu yang telah ditetapkan (Jones and Walker, 2007), menjelaskan *financial distress* diartikan sebagai ketidakmampuan untuk menyediakan layanan di tingkat yang sudah ada berdasarkan standar pelayanan mutu yang telah ditetapkan. Alasan yang menjelaskan mengenai kondisi financial distress ialah kurangnya sumber daya pada sebuah organisasi dan keterampilan manajerial yang yang dapat memberikan pengaruh ketidakmampuan untuk memberikan layanan berkualitas dalam menghadapi kondisi yang berubah (Jones and Walker, 2007).

Perubahan kondisi ini menimbulkan tekanan *financial distress* pada pemerintah daerah, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan penurunan pengeluaran pemeliharaan dalam memenuhi infrastruktur dan penurunan investasi modal pada infrastruktur untuk mendanai pengeluaran lain (Ulrich *et al.*, 1991). Untuk memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah diharapkan dapat berinvestasi dalam bentuk infrastruktur serta dapat memeliharanya. Investasi pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan *financial distress* adalah investasi publik dalam artian pemerintah daerah yang tercermin dengan belanja modal (Jones and Walker, 2007). *Financial distress* pada pemerintah daerah selain dapat dilihat dari faktor keuangan dapat juga dilihat dari karakter pemerintah daerah dalam menjalankan kepemerintahannya berdasarkan faktor internal dan eksternal pada daerah tersebut (Trumbo *et al.*, 2016). Karakteristik pemerintah dapat dilihat

dari pengukuran tingkat kemandirian pemerintah tersebut dalam mengelola dana yang ada agar belanja modal memiliki persentase yang cukup besar, bagaimana pemerintah mengalokasikan sesuai dengan jumlah penduduk pada daerah tersebut, pemekaran wilayah pada daerah tersebut yang tentu akan menambah jumlah beban yang ditanggung, serta luas daerah tersebut sehingga pembangunan dan infrastruktur dapat direalisasikan dengan baik (Trussel dan Patrick, 2013).

Merujuk pada pembangunan infrastruktur, data realisasi menunjukkan kondisi yang semakin membaik belakangan ini. Berita terbaru menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi cukup stabil selama dan pasca terjadinya covid-19 (Ma'rifah, 2022). Stabilitas keuangan ini terjadi pada saat kondisi suatu negara berada pada kondisi sehat keuangan atau *financial health*. Hal tersebut merupakan topik yang selalu berkembang dan menjadi perhatian banyak kalangan sejak krisis keuangan yang terjadi pada tingkat nasional maupun internasional beberapa tahun ke belakang. Krisis keuangan selama covid ini di Indonesia disebabkan oleh pandemi yang menyebabkan goncangan eksternal melalui nilai tukar yang berdampak terhadap stabilitas perbankan domestik dan berujung pada krisis multi dimensi. Ketidakstabilan ini menyebabkan *domino effect* terhadap solvabilitas dan likuiditas lembaga-lembaga keuangan di negara-negara tersebut. Ketidakstabilan yang terjadi pada sektor keuangan menimbulkan dampak buruk yakni hilangnya kepercayaan masyarakat pada fungsi intermediasi lembaga keuangan, menurunnya pertumbuhan ekonomi, dan biaya pemulihan akibat krisis sangatlah besar. Oleh sebab itu, stabilitas keuangan menjadi penting untuk dikaji sebagai salah satu langkah preventif dalam berbangsa dan bernegara.

Langkah preventif ini jika dilakukan secara konsisten maka akan mengantarkan indonesia pada keadaan finansila yang berkelanjutan. *Financial sustainability*. Keberlanjutan keuangan atau *financial sustainability* merujuk pada kemampuan pemerintah untuk mempertahankan kestabilan keuangan negara dan menyediakan layanan publik dalam jangka panjang, dengan memperhatikan berbagai faktor terkait kebijakan pendapatan dan belanja, beban pembayaran utang, serta kondisi sosial ekonomi dan lingkungan di masa depan. Dalam jangka pendek dan menengah, strategi pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang berkelanjutan harus didasarkan pada asumsi-

asumsi ekonomi makro yang hati-hati, memperhatikan analisis risiko, dan memperhitungkan keterbatasan keuangan yang ada. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien dapat mengakibatkan ketidakberlanjutan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat. Irvine & Ryan (2019) menyebutkan bahwa organisasi yang lebih besar, dengan potensi efisiensi biaya yang lebih tinggi, cenderung lebih mampu mencapai keberlanjutan finansial dan menghadapi ketidakpastian terkait pendanaan dari pemerintah. Sementara itu, Bisogno et al. (2019) menegaskan bahwa pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah sangat penting untuk menciptakan keberlanjutan pemerintah daerah, mulai dari sumber pembiayaan hingga pendanaannya.

Beberapa penelitian telah membahas secara parsial mengenai *financial health*, *financial distress*, maupun *financial sustainability* dengan berbagai metode penelitian. Namun, penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut mayoritas dilakukan secara terpisah dan kebanyakan dilakukan pada sektor perbankan maupun sektor bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang mencoba menjawab hubungan antara ketiga variable tersebut terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini.

Studi ini memberikan beberapa kontribusi. Pertama, memberikan kontribusi untuk pengembangan akuntansi dan audit di lingkungan pemerintahan, yang mana artikel ini diharapkan dapat memberikan jawaban secara empiris mengenai pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Kedua, memberikan kontribusi kepada pemerintah agar pemerintah dapat memutuskan kebijakan dan tidak skeptis dalam menyusun prosedur dan penganggaran pendanaan di Indonesia. Ketiga, memberikan kontribusi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran untuk mengawasi daerah-daerah agar pertumbuhan ekonomi berjalan stabil. menghasilkan salah satu studi pertama yang membahas kesehatan keuangan di tingkat lokal,

mengukurnya dengan merujuk pada empat dimensi solvabilitas, yaitu solvabilitas kas, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas tingkat layanan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) se-Jawa Tengah tahun 2020-2022 dan data publikasi Balai Pusat Statistik (BPS) berupa jumlah penduduk. Populasi pada penelitian adalah pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada periode anggaran 2020-2022 sebanyak 29 Kabupaten dan 6 Kota di Indonesia. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel jenuh, yang mana menurut Sugiyono (2009), sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Berikut merupakan definisi operasional variabel dan pengukurannya:

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukurannya

Variabel	Definisi Operasional	Rumus
<i>Economic Growth</i>		<i>Growth Domestic Bruto</i>
<i>Financial Distress (FDT)</i>	<i>Financial Distress</i> adalah ketidakmampuan pemerintah daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan daerahnya yang diakibatkan adanya penurunan ekonomi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. $Budget Solvency = \frac{BS}{Total Regional Revenue}$ 2. $FPB = \frac{Total Regional Revenue + Total Expenditure}{Total Total Regional Revenue}$ 3. $PPF = \frac{Total Revenue - Total Expenditure}{Total Fund Equity}$ 4. $RFE = \frac{Expenditure}{Total Revenue}$
<i>Financial Health</i>	Kondisi keuangan adalah kemampuan dari sebuah organisasi untuk dapat memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. $Solvabilitas Jangka Pendek = \frac{Aset Lancar}{Kewajiban Lancar}$ 2. $Solvabilitas Jangka Panjang = \frac{Ekuitas}{Kewajiban}$ 3. $Solvabilitas Anggaran dan Solvabilitas Operasional$ $Solvabilitas Anggaran = \frac{Total Pendapatan LRA}{Total Belanja}$ $Solvabilitas Operasional = \frac{Total Pendapatan LO}{Total Beban}$ 4. $Fleksibilitas Keuangan = \frac{Total Pendapatan LO - Total Pendapatan DAK LO}{Total Kewajiban + Beban Pegawai}$ 5. $Solvabilitas Layanan = \frac{Total Beban LO}{Penduduk}$ 6. $Kemandirian Keuangan = \frac{Total PAD LO}{Total Beban}$
<i>Financial Sustainability</i>		$FNS = Operating Income - Operating Expense$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Berikut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti:

Model	B	t	Sig.
Constant	11.566	2.600	0.011
FDT	-2.038	-1.858	0.066
FCH	-8.198E-7	-2.304	0.023
FS	2.365E-12	1.466	0.146

Sumber: Data diolah, 2024

3.2. Pembahasan

Berdasarkan data yang telah dihimpun dan diuji oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa:

- a. Financial health berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0.011 < 0,05$; yang artinya financial health mampu mencerminkan kondisi Indonesia saat ini. Sesuai dengan definisi yang telah peneliti paparkan sebelumnya bahwa kesehatan keuangan atau yang seringkali disebut dengan kondisi keuangan adalah suatu kemampuan negara untuk memenuhi kewajibannya dengan sumber daya yang tersedia saat ini (Cuadrado-Ballesteros and Bisogno, 2022). Jika berbicara dan bercermin dalam sektor publik, Kesehatan keuangan adalah kemampuan suatu entitas sektor publik untuk menyediakan layanan public sekaligus mampu untuk memenuhi kewajiban mereka saat ini dan masa depan (Brown, 1993; Kloha dkk., 2005; Zafra-Gómez dkk., 2009a, b, c; López-Hernández dkk., 2012; García-Sánchez dkk., 2014; Cabaleiro dkk., 2013; Bisogno dkk., 2019; Cuadrado-Ballesteros dan Bisogno, 2018). Yang artinya bahwa kondisi keuangan Indonesia saat ini berada pada kondisi sehat. Mengingat bahwa Kesehatan keuangan sulit untuk direpresentasikan karena memiliki konsep abstrak yang tidak mudah untuk diamati. Peneliti mencoba menggunakan pendekatan dengan merujuk pada empat dimensi solvabilitas yakni solvabilitas kas,

solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka Panjang, dan solvabilitas Tingkat layanan. Untuk memastikan dan memperkuat kondisi Kesehatan Kabupaten/ Kota merupakan salah satu target penting dalam SDGs. Dengan berkembangnya suatu negara maka akan meningkatkan kekuatan urbanisasi, sehingga permintaan layanan publik dan utilitas dari Kabupaten/Kota meningkat dari hari ke hari. Melalui beberapa berita yang telah diunggah, didapatkan informasi bahwa Kabupaten/ Kota telah mampu untuk meningkatkan pendapatan guna memenuhi komitmen dan kewajiban layanan kepada Masyarakat, seperti Pembangunan bendungan, fly over, underpass, dan lain sebagainya. Temuan penting lainnya dalam penelitian ini yakni Kabupaten/ Kota yang berada di Jawa Tengah memiliki solvabilitas kas yang lebih dari cukup dan solvabilitas jangka Panjang yang positif dengan kewajiban jangka Panjang yang wajar per kapita untuk beberapa Kabupaten/ Kota karena terbatasnya kewajiban eksternal yang ada dan mampu membayarnya, sehingga pemerintah daerah dengan cepat dapat memperoleh pinjaman dalam dan atau luar negeri untuk meningkatkan kemampuan keuangan mereka dan segera memenuhi pengeluaran daerah tersebut. Selanjutnya, dalam kasus solvabilitas anggaran bernilai positif yakni ditemukan bahwa pengeluaran Kabupaten/ Kota tidak lebih besar daripada pendapatan yang mereka peroleh.

- b. Financial Distress tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena dalam pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi $0.066 > 0,05$; yang artinya kondisi financial distress tidak dapat mencerminkan keadaan Indonesia saat ini.

c. Financial sustainability tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan uji analisis membuktikan bahwa nilai signifikansi variable tersebut bernilai $0.146 > 0,05$; yang artinya financial sustainability tidak mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Setelah pandemi terjadi di Indonesia, keberlanjutan keuangan menjadi isu penting dalam manajemen sektor publik, tidak hanya pada tingkat pemerintah pusat, tetapi juga pada tingkat pemerintah daerah. Secara umum, pemerintah pusat menganggap kejadian resesi yang muncul saat ini sebagai suatu penghematan, sedangkan system pemerintah daerah memiliki respon yang berbeda. Selebihnya, isu terkait dengan keberlanjutan fiscal ini adalah ketahanan pemerintah dalam menghadapi guncangan secara eksternal. Dampak, adanya pandemi memberikan tekanan besar bagi pemerintah untuk meningkatkan pemulihan ekonomi dengan memastikan anggaran yang seimbang. Namun nyatanya kondisi perekonomian di Indonesia saat ini tidak mencerminkan financial sustainability. Hal ini dikarenakan kondisi structural ekonomi masih belum dapat terealisasi dengan sempurna. Dari data yang telah dihimpun oleh peneliti ditemukan bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah melakukan pinjaman untuk membiayai dan melakukan pelayanan kepada Masyarakat saat ini, sehingga hal ini jika dilakukan secara terus menerus maka akan memperburuk kondisi pemerintah daerah dan berimbas pada penumpukan biaya kepada generasi mendatang dan pelayanan yang tidak optimal di masa depan. Dalam hal ini, pemerintah daerah yang seharusnya melakukan system desentralisasi belum sepenuhnya mandiri dalam melaksanakan kewajiban pemerintahannya. Selain itu, kondisi keuangan saat ini dinilai menambah beban kepada masyarakat yang dapat dilihat dari ekuitas antar generasi. Yang mana ekuitas antar generasi ini

dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam menilai kelayakan keuangan di masa depan dalam rangka menyediakan pelayanan kepada publik. Selain itu, pada kenyataannya masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pemerintah, yang mana hal ini nyatanya juga tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Dampak dari pengelolaan yang tidak baik ini nanrinya akan menyebabkan kondisi keuangan yang tidak berkelanjutan dan akan berujung pada buruknya pelayanan kepada Masyarakat dimasa depan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, data, dan hasil yang telah penguji lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan peneliti sebelumnya bahwa didapatkan hasil financial health mencerminkan kondisi perekonomian di Indonesia saat ini, namun financial distress yang dinilai sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19. Serta, financial sustainability belum mencerminkan kondisi perekonomian saat ini, yang mana financial sustainability diprediksi menjadi hal yang kuat untuk menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini sebagai hasil dari adanya program pemulihan ekonomi nasional.

5. REFERENSI

- Abbas, H.S.M., Abbas, S., Gillani, S. and Xu, X. (2024), "Role of Digital-Government, Regional Integration, and Government Expenditures on Public Health Services in Selected Asian Economies", *Social Indicators Research*, Springer Netherlands, No. 0123456789, available at:<https://doi.org/10.1007/s11205-024-03379-8>.
- Adetokunbo, A.M. and Yusuf, I.J. (2024), "Economic openness, institutional quality and economic growth in

- Nigeria”, *SN Business & Economics*, Springer International Publishing, Vol. 4 No. 7, pp. 1–21.
- Aduhene, D.T. and Osei-Assibey, E. (2021), “Socio-economic impact of COVID-19 on Ghana’s economy: challenges and prospects”, *International Journal of Social Economics*, Vol. 48 No. 4, pp. 543–556.
- Agyemang, J., Azure, J., Kimani, D. and Arun, T. (2023), “Governmental financial resilience during pandemics: the case of West Africa”, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol. 35 No. 3, pp. 385–414.
- ALshubiri, F. (2024), “Do foreign direct investment inflows affect tax revenue in developed and developing countries?”, *Asian Review of Accounting*, Vol. 32 No. 5, pp. 781–810.
- ALshubiri, F. and Al Ani, M.K. (2024), “Do intellectual property rights promote foreign direct investment inflows and technological exports in developing and developed countries?”, *Foresight*, Vol. 26 No. 2, pp. 272–299.
- Amusa, K. and Oyinlola, M.A. (2019), “The effectiveness of government expenditure on economic growth in Botswana”, *African Journal of Economic and Management Studies*, Vol. 10 No. 3, pp. 368–384.
- Bethlendi, A., Lentner, C. and Nagy, L. (2020), “The issue of sustainability in a highly centrally regulated fiscal model of local governments: an empirical study”, *Accounting Research Journal*, Vol. 33 No. 6, pp. 669–689.
- Bocchino, M. and Padovani, E. (2021), “Does municipal fiscal distress hinder inter-municipal cooperation?”, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol. 33 No. 5, pp. 552–574.
- Budgeting, J.O.F.P. (2013), “PREDICTING FISCAL DISTRESS IN SPECIAL DISTRICT GOVERNMENTS John M. Trussel, and Patricia A. Patrick*”, Vol. 25 No. 4, pp. 589–616.
- Cohen, S., Costanzo, A. and Manes-Rossi, F. (2017), “Auditors and early signals of financial distress in local governments”, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 32 No. 3, pp. 234–250.
- Cuadrado-Ballesteros, B. and Bisogno, M. (2022), “Budget transparency and financial sustainability”, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol. 34 No. 6, pp. 210–234.
- Diab, A. (2024), “The implications of the COVID-19 pandemic for employment and government accountability: evidence from an emerging market”, *Journal of Accounting in Emerging Economies*, Vol. 14 No. 4, pp. 886–909.
- Dudzevičiūtė, G., Šimelytė, A. and Liučvaitienė, A. (2018), “Government expenditure and economic growth in the European Union countries”, *International Journal of Social Economics*, Vol. 45 No. 2, pp. 372–386.
- Farooq, M., Qureshi, S.F. and Bhutta, Z.M. (2021), “Indirect financial distress costs in non-financial firms: evidence from an emerging market”, *Pacific Accounting Review*, Vol. 33 No. 4, pp. 417–434.
- Irvine, H. and Ryan, C. (2019), “The financial health of Australian universities: policy implications in a changing environment”, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 32 No. 5, pp. 1500–1531.
- Jones, S. and Walker, R.G. (2007), “Explanators of local government distress”, *Abacus*, Vol. 43 No. 3, pp. 396–418.
- Kalra, R. (2010), “Financial Stress: What Is It, How Can It Be Measured, and Why Does It Matter?”, *CFA Digest*, Vol. 40 No. 1, pp. 5–50.
- Li, X., Chen, S. and Wang, S. (2023), “Economic growth, government efficiency, and biodiversity loss: an international trade perspective”,

- Environment, Development and Sustainability*, Springer Netherlands, No. 0123456789, available at:<https://doi.org/10.1007/s10668-023-04059-2>.
- Li, Y. and Zhu, X. (2023), "The effects of government spending on consumption and the real exchange rate: a comparison between developed and developing countries", *International Journal of Emerging Markets*, No. 2013, available at:<https://doi.org/10.1108/IJOEM-11-2020-1395>.
- Liu, Z., Tong, Z. and Zhang, Z. (2023), "Government expenditure structure, technological progress and economic growth", *International Journal of Emerging Markets*, Vol. 19 No. 11, pp. 3729–3767.
- Ma'rifah, A. (2022), "The Effect of Infrastructure Development on Economic Growth", *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, Vol. 5 No. 3, pp. 230–241.
- Maher, C.S., Oh, J.W. and Liao, W.J. (2020), "Assessing fiscal distress in small county governments", *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol. 32 No. 4, pp. 691–711.
- Mamun, T.M. and Chowdhury, S. (2022), "Assessing fiscal health of local governments in Bangladesh: evidence from some south-western municipalities", *Public Administration and Policy*, Vol. 25 No. 1, pp. 50–63.
- Martell, C.R. (2024), "The impact of inflation on local government fiscal health", *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol. 36 No. 2, pp. 234–252.
- Mouna, A., Nedra, B. and Khaireddine, M. (2020), "International comparative evidence of e-government success and economic growth: technology adoption as an anti-corruption tool", *Transforming Government: People, Process and Policy*, Vol. 14 No. 5, pp. 713–736.
- Murtaza, M.R., Hongzhong, F., Hashmi, S.H. and Ullah, A. (2024), "The nexus of green energy, financial inclusion, government defense financing, and socioeconomic sustainability across diverse income-level groups: a global indication", *Clean Technologies and Environmental Policy*, Springer Berlin Heidelberg, Vol. 26 No. 10, pp. 3391–3410.
- Ogeh, V.O., Harvey, S.K. and Hagan, E. (2008), "Fiscal policy, private investment and economic growth: The case of Ghana", *Studies in Economics and Finance*, Vol. 25 No. 2, pp. 112–130.
- Olaoye, O. and Afolabi, O. (2020), "Government spending and economic growth: a trivariate causality testing", *African Journal of Economic and Management Studies*, Vol. 12 No. 2, pp. 250–268.
- Onyango, G. (2024), "The Post-COVID-19 Economic Recovery, Government Performance and Lived Poverty Conditions in Kenya", *Public Organization Review*, Springer US, Vol. 24 No. 1, pp. 369–387.
- Ortiz, B., Donate, M.J. and Guadamilas, F. (2021), "Intra-Organizational Social Capital and Product Innovation: The Mediating Role of Realized Absorptive Capacity", *Frontiers in Psychology*, Vol. 11 No. January, available at:<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.624189>.
- Ramirez, M.D. (2024), "A Note on Foreign Capital, Economic Growth, and Convergence: A Simple Model with Endogenous Growth", *International Advances in Economic Research*, Springer US, No. 0123456789, available at:<https://doi.org/10.1007/s11294-024-09914-0>.
- Raudla, R. and Douglas, J. (2024), "Editorial: Debts, deficits, and inflation: prescriptions for the future", *Journal of*

- Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol. 36 No. 2, pp. 195–199.
- Raza, G., Jan, K. and Kazmi, S.Z.A. (2024), “Agri-entrepreneurship in developing countries – a systematic review of smallholders’ constraints”, *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, available at:<https://doi.org/10.1108/JADEE-06-2024-0185>.
- Rodríguez Bolívar, M.P., Navarro Galera, A., López Subirés, M.D. and Alcaide Muñoz, L. (2018), “Analysing the accounting measurement of financial sustainability in local governments through political factors”, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 31 No. 8, pp. 2135–2164.
- Ruan, X., Li, K., Yang, M., Dong, Z. and Wang, G. (2024), “From china to the world: the implications of fiscal decentralization, government debt, and public health dynamics”, *Environment, Development and Sustainability*, Springer Netherlands, No. 0123456789, available at:<https://doi.org/10.1007/s10668-024-05529-x>.
- Sehgal, S., Mishra, R.K., Deisting, F. and Vashisht, R. (2021), “On the determinants and prediction of corporate financial distress in India”, *Managerial Finance*, Vol. 47 No. 10, pp. 1428–1447.
- Silva, T.C., Muniz, F.J. and Tabak, B.M. (2023), *The Impact of Government Disaster Surveillance and Alerts on Local Economic and Financial Conditions*, *Environmental and Resource Economics*, Vol. 84, Springer Netherlands, available at:<https://doi.org/10.1007/s10640-022-00736-4>.
- Sinervo, L.M., Bartocci, L., Lehtonen, P. and Ebdon, C. (2024), “Toward sustainable governance with participatory budgeting”, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol. 36 No. 1, pp. 1–19.
- Trumbo, C.W., Peek, L., Meyer, M.A., Marlatt, H.L., Gruntfest, E., McNoldy, B.D. and Schubert, W.H. (2016), “A Cognitive-Affective Scale for Hurricane Risk Perception”, *Risk Analysis*, Vol. 36 No. 12, pp. 2233–2246.
- Tunio, F.H., Nabi, A.A., Dawood, M. and Shaikh, S. ud D. (2024), “Fiscal policy for economic growth and environmental quality: insights from Pakistan’s fiscal decentralization”, *Discover Sustainability*, Springer International Publishing, Vol. 5 No. 1, available at:<https://doi.org/10.1007/s43621-024-00373-5>.
- Udin, S., Khan, M.A. and Javid, A.Y. (2017), “The effects of ownership structure on likelihood of financial distress: an empirical evidence”, *Corporate Governance (Bingley)*, Vol. 17 No. 4, pp. 589–612.
- Ulrich, R.S., Simons, R.F., Losito, B.D., Fiorito, E., Miles, M.A. and Zelson, M. (1991), “Stress recovery during exposure to natural and urban environments”, *Journal of Environmental Psychology*, Vol. 11 No. 3, pp. 201–230.
- Wang, X. and Chen, C. (2022), “An empirical analysis of capital assets condition ratio in local governments: the case of Florida counties”, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol. 34 No. 2, pp. 330–346.
- Yap, D.Y.P. (2024), “Developing country status in the WTO: investigating self-designation and perpetuation of the ‘pretend’ culture”, *Journal of International Trade Law and Policy*, Vol. 23 No. 1, pp. 1–13.
- Zhang, D., Wellalage, N. and Fernandez, V. (2024), “Temporary employment and financial distress in times of crisis”, *Journal of Risk Finance*, Vol. 25 No. 4, pp. 602–628.
- Zungu, L.T. and Greyling, L. (2022), “Government size and economic growth in African emerging economies: does the

BARS curve exist?”, *International Journal of Social Economics*, Vol. 49 No. 3, pp. 356–371.